

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Keterjadian *Flypaper Effect* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022

Regina Triyansi Susan ¹, Yosefina Andia Dekrita ²,
Konstantinus Pati Sanga ³

Universitas Nusa Nipa Maumere

Email: reginatriyansi@gmail.com

Abstract : This study aims to determine the effect of Local Original Revenue and Balancing Fund on Regional Expenditure and another purpose of this study is to determine whether there is a Flypaper Effect on the Local Government of Sikka District for Fiscal Year 2018-2022. This study used a type of causal associative research with quantitative techniques. The population of this study is the Sikka District Budget for Fiscal Year 2018-2022. The sample of this study is the Regional Budget Realization Report of Sikka District during the 2018-2022 fiscal year, the data used is in the form of secondary data. Data collection techniques use documentation methods and literature studies. Data analysis methods include descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple linear regression, and hypothesis tests with *t* tests, *F* tests and multiple determination coefficient tests. The results of this study prove that partially Regional Original Revenue and Balancing Fund have no effect on Regional Expenditure. Simultaneously, Local Original Revenue and Equalization Fund have no effect on Daearh Expenditure. The test results show that the coefficient of the Balancing Fund is greater than the coefficient of Regional Original Income. This shows that there has been a Flypaper Effect on the Local Government of Sikka District during the Fiscal Year 2018-2022.

Keywords : Local Original Revenue, Balancing Fund, Regional Expenditure, Flypaper Effect

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dan tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022. Sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka selama tahun anggaran 2018-2022, data yang digunakan berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta uji hipotesis dengan uji *t*, uji *F* dan uji koefisien determinasi berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daearh. Hasil pengujian menunjukan bahwa koefisien Dana Perimbangan lebih besar dari koefisien Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka selama Tahun Anggaran 2018-2022.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, *Flypaper Effect*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dan terdiri dari beberapa wilayah daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Adapun kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Sehingga dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk menanganinya sendiri. Reformasi akhirnya membawa perubahan bagi negara yakni pada pola hidup sosial, politik, dan ekonomi.

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan ketidakadilan di setiap daerah, maka sejak awal tahun 2001 sistem tersebut diubah menjadi sistem desentralisasi dan mulai diterapkan kebijakan-kebijakan otonomi daerah. Sistem desentralisasi ialah dimana pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan pemerintahannya di daerahnya masing-masing. Wewenang pemerintah daerah ini disebut dengan otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah merupakan tahap awal bagi pemerintah dalam mengembangkan masalah perekonomian nasional, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia, guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Di era otonomi saat ini, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan fiskalnya melalui penggalan potensi fiskal atau PAD yang dimiliki suatu daerah agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Disamping itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa transfer dana yaitu dana perimbangan yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan kemandirian fiskal daerah.

Menurut Badrudin (2017) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.

APBD berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. APBD juga secara langsung ataupun tidak langsung menggambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut juga berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (Kido *et al.*, 2022). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah (UU Nomor 23 Tahun 2014). Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud daripada desentralisasi.

Dana Perimbangan atau biasa disebut dengan dana transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dialokasikan kepada setiap daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, (UU Nomor 1 Tahun 2022). Alokasi dana perimbangan oleh pemerintah pusat didasarkan pada potensi fiskal daerah yang apabila potensi fiskal suatu daerah besar, namun kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh dana perimbangan yang relatif kecil. Begitupun sebaliknya jika potensi fiskal suatu daerah kecil akan tetapi kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh dana perimbangan yang juga relatif besar. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melihat kemampuan APBD suatu daerah dalam membiayai kebutuhan daerah untuk pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD yang dikurangi dengan belanja pegawai. Transfer dana oleh pemerintah pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah akan dilaporkan dan diperhitungkan dalam APBD. Selain dana perimbangan, daerah juga memiliki sumber pembiayaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain Daerah yang sah (Bahri, 2021). Pengalokasian dana perimbangan umumnya didasarkan pada aspek belanja daerah akan tetapi pemerintah daerah kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD, akibatnya setiap tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat. Apabila kondisi ini terus berlanjut maka pemerintah daerah akan bergantung pada alokasi dana perimbangan oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Meningkatnya belanja daerah sejalan dengan pesatnya pembangunan daerah yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah yang besar untuk membiayai kegiatan yang berlangsung. Apabila kebutuhan belanja pemerintah terpenuhi, maka sangat diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan diluar dari pelaksanaan program dan kegiatan yakni belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, (Permendagri, Nomor 77 Tahun 2020). Sumber-sumber pembiayaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Namun dalam proses pembiayaan ini pemerintah daerah masih seringkali menggunakan dana perimbangan untuk pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Hal ini dikarenakan rendahnya kontribusi dari PAD.

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah melakukan pembiayaan untuk belanja daerah yang terlalu tinggi melalui dana perimbangan oleh pemerintah pusat dibandingkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua hal. Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap dana transfer lebih tinggi dibandingkan dengan elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah (Gorodnichenko dalam (Imam Malik, 2021:192-216). Penyebab terjadinya *flypaper effect* ialah karena adanya pengaruh koefisien Dana Perimbangan terhadap belanja daerah lebih besar ketimbang pengaruh koefisien Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah. Artinya bahwa pemberian Dana Perimbangan seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah yang kemudian menjadikan daerah memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat (Mirda Samtia, 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ansori, (2021) dengan judul *Fenomena Flypaper Effect Atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota di Pulau Bali dan Nusra*, menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah, akan tetapi koefisien dana perimbangan lebih berpengaruh dalam hal belanja daerah daripada koefisien Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, terjadi *flypaper Effect* pada belanja daerah. Menurut Novella (2020) dalam penelitiannya tentang *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah* menunjukkan bahwa baik Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan tidak terjadi fenomena *flypaper effect*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marici *et al.* (2022) dengan judul *Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah* yang menyatakan bahwa Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pula nilai pemerintah daerah tersebut yang disebabkan karena adanya peran dana perimbangan yang sangat signifikan, sehingga belanja daerah lebih didominasi dari jumlah dana perimbangan yang ditunjukan untuk belanja modal, pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana, yang oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi eksploitasi sumber daya alam yang mendorong adanya pendapatan asli daerah dapat secara tidak langsung mampu memberikan efek terhadap jumlah penerimaan dana transfer dan mampu meningkatkan jumlah belanja daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah sendiri tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan belanja daerah akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah, yang diindikasikan berdasarkan penerimaan fiskal dari pendapatan asli daerah belum mengarah pada penambahan belanja daerah. Maka dapat dikatakan ketergantungan fiskal daerah terhadap alokasi dana perimbangan sangat besar.

Menurut Aprilia Magie Andrea Sembel, Vekie A. Rumat, (2018) dalam penelitiannya dengan judul *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Provinsi Sulawesi Utara*, menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap Belanja Daerah.

Hal ini berarti pendapatan asli daerah cukup dominan dalam menentukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang sebagaimana terwujud pada perkembangan anggaran daerah (APBD). Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti jika dana perimbangan mengalami fluktuasi naik atau turun tidak akan mempengaruhi naik atau turunnya belanja daerah. Karena tidak sepenuhnya belanja diambil dari dana perimbangan. Serta tidak terjadinya *flypaper effect*, yang dilihat dari besaran koefisien pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan dengan koefisien dana perimbangan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut diatas tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lainnya atau seluruh wilayah Indonesia. Ini dikarenakan terdapat perbedaan setiap daerah yang dilihat dari segi karakteristik baik geografis, kondisi ekonomi, begitupun dengan kehidupan masyarakatnya. Hal lain yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, tahun pengamatan, populasi maupun sampelnya.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur yang secara administratif saat ini terdiri dari 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 147 Desa, dengan jumlah penduduk sebesar 321.953 jiwa. Luasnya daerah juga berpengaruh akan tingkat kebutuhan masyarakat dan fasilitas daerah. Hal ini perlu adanya dukungan dari pendapatan asli daerah agar mampu memenuhi segala kebutuhan daerah, yang tidak terlepas dari dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga dapat menunjang jumlah pendapatan asli daerah yang merupakan bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah. Akan tetapi, tujuan utama pemerintah pusat memberikan dana transfer ialah untuk menghindari kesenjangan fiskal antar daerah juga diharapkan agar secara efektif dan efisien digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga apabila pemerintah daerah tanpa sadar menggantungkan diri pada dana transfer secara terus menerus tanpa menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka kemungkinan besar terjadi pemborosan dalam hal pembiayaan belanja daerah.

Berikut ini adalah data Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2018-2022. Tabel dibawah akan menjelaskan berapa besar pendapatan asli daerah yang direalisasikan dan seberapa besar kontribusi dana perimbangan dalam APBD Kabupaten Sikka selama tahun 2018-2022.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
			(Rp)	(%)
2018	113.842.662.820,00	100.868.194.503,01	(12.974.468.316,99)	88,60%
2019	104.401.857.125,00	99.619.556.108,26	(4.782.301.016,74)	95,42%
2020	108.613.927.900,59	119.601.046.361,49	(10.987.118.460,90)	110,12%
2021	106.431.778.313,00	90.816.311.412,52	(15.615.466.900,48)	85,31%
2022	105.724.221.360,00	96.656.644.905,07	(9.067.576.454,93)	91,42%

Sumber : *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka*

Berdasarkan data diatas terlihat jelas bahwa target PAD dari tahun 2018-2022 setiap tahunnya menurun dengan target yang lebih besar yang dianggarkan pada tahun 2018 sebesar Rp.113.842.662.820,00. Hal ini tidak berbanding lurus dengan nilai realisasi PAD setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi di tahun 2020 sebesar Rp.119.601.046.361,49 dan angka terendah di tahun 2021 sebesar Rp.90.816.311.412,52. Hal ini dikarenakan oleh faktor daya beli masyarakat yang menurun, kenakalan wajib pajak yang melalaikan pembayaran pajak, kurang maksimalnya pengelolaan oleh pemerintah daerah akan potensi daerah, sehingga mengakibatkan pendapatan daerah yang tidak meningkat dan berpengaruh terhadap jumlah realisasi pendapatan asli daerah untuk belanja daerah yang rendah.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target Dana Perimbangan (Rp)	Realisasi Dana Perimbangan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
			(Rp)	(%)
2018	828.522.638.244,00	815.667.524.215,00	(12.855.114.029,00)	98,45%
2019	916.408.690.000,00	896.834.859.563,00	(19.573.830.473,00)	97,86%
2020	776.489.330.098,00	765.074.025.024,00	(11.415.305.074,00)	98,53%
2021	1.042.991.969.624,00	1.001.126.676.974,00	(41.865.292.650,00)	95,99%
2022	1.018.403.908.640,00	952.943.640.966,53	(65.460.267.673,47)	93,57%

Sumber : *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka*

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa target dana perimbangan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi sebesar Rp.1.042.991.969.624,00 pada tahun 2021 dan nilai terendah sebesar Rp.776.489.330.098,00 pada tahun 2020. Hal ini juga tidak berbanding lurus dengan nilai realisasi dana perimbangan setiap tahunnya dengan nilai tertinggi sebesar Rp.1.001.126.676.974,00 pada tahun 2021 dan nilai terendah sebesar Rp.765.074.025.024,00. Kondisi ini merupakan siklus umum yang terjadi di setiap tahun ketika adanya peningkatan aktivitas perekonomian daerah.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
			(Rp)	(%)
2018	1.190.849.219.386,09	1.113.230.884.135,82	(30.822.418.286,80)	93,48%
2019	1.292.978.286.226,28	1.217.674.679.695,37	(75.303.606.530,91)	94,18%
2020	1.152.709.950.104,57	1.121.887.531.817,77	(30.822.418.286,80)	97,33%
2021	834.960.951.343,76	1.112.256.100.953,75	(317.191.634.678,49)	77,81%
2022	1.404.544.704.999,00	1.218.737.416.032,00	(185.807.288.967,00)	86,77%

Sumber : *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka*

Dari data tersebut diatas juga dapat dilihat bahwa target belanja daerah selama tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, kembali menurun di tahun 2021 sebesar Rp.834.960.951.343,76 dan meningkat kembali di tahun 2022 sebesar Rp. 1.404.544.704.999,00. Sedangkan realisasi belanja daerah pun terus meningkat di setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 jumlah realisasi belanja daerah lebih besar dari target yang dianggarkan yakni sebesar Rp.1.112.256.100.953,75.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agency

Menurut Michael C. Jensen (1976:305-360) menyatakan bahwa teori keagenan berfokus pada hubungan kontraktual antara (yang memberikan amanah) dengan agen (yang memegang amanah). Teori keagenan berasumsi bahwa agen dan prinsipal memiliki kepentingan masing-masing dalam menjalankan kontrak kerja. Teori keagenan memprediksi bahwa dalam hubungan prinsipal dan agen terdapat ketimpangan informasi. Agen memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal. Akibatnya, terjadi permasalahan prinsipal dan agen (*principal-*

agent) yang berupa *adverse selection* (pilihan buruk) dan *moral hazard* (bencana moral). Teori keagenan adalah studi tentang kesepakatan antara dua pihak atau lebih baik individu, tim, maupun organisasi.

2.2 Teori Ilusi Fiskal

Menurut Priyo dan Puspa dalam Fiorentina (2021), Teori mengenai ilusi fiskal pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Italia yang bernama Amilcare Puviani. Beliau menggambarkan bahwa ilusi fiskal terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan laporan keuangan yang mampu merubah perilaku keuangan. Ilusi fiskal mengindikasikan bahwa pemerintah akan melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan sedemikian rupa, sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada persepsi atau penilaian maupun pada tindakan atau perilaku tertentu. Ilusi fiskal dapat dideteksi baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran, maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan dalam daerah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan perekonomian dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri (Bahrul dalam Amir, 2021).

2.4 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 maka dana perimbangan terdiri dari tiga (3) jenis yakni :

1) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus

dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

3) Dana Bagi Hasil (DBH)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana APBN yang telah didistribusikan kepada daerah berdasarkan suatu angka persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam segi potensi daerah penghasil.

2.5 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam suatu anggaran periode. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mendefinisikan bahwa belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran dari pemerintah daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang ekuitas serta kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

2.6 *Flypaper Effect*

Istilah *Flypaper Effect* diperkenalkan pertama kali oleh P. Courant, Gramlich, E. (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran yang menyatakan “*money sticks where it hits*” Kuncoro dalam (Amir, 2021). Kemudian dikembangkan oleh Brian & Andrew Worthington (1995), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer (*grants*) untuk memperluas belanja publik daripada penggunaan pendapatan daerah itu sendiri, (Ardiansyah, 2019).

Flypaper Effect itu sendiri merupakan respon yang tidak simetris atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana Imam Malik (2021:192-216) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan dana transfer (*grants*) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain *flypaper effect* merupakan kondisi dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer dalam merespon pengeluaran daerah.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subadriyah (2017:559-570) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dikarenakan sebagian besar pembiayaan belanja daerah yang ada pada APBD ditentukan oleh pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirda Samtia (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula belanja daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penghasilan daerah yang diperoleh melalui pembayaran pajak oleh masyarakat, dan pendapatan lain yang murni bersumber dari potensi-potensi suatu daerah. Pendapatan asli daerah dapat menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah secara luas, merata, dan bertanggungjawab dan sejauh mana kemandirian dari suatu daerah dalam pembiayaan belanja daerah. Apabila pendapatan asli daerah meningkat secara terus menerus maka dapat dikatakan bahwa daerah sudah mandiri dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan tidak bergantung pada dana transfer oleh pemerintah pusat. Sebaliknya jika tuntutan belanja daerah yang meningkat dengan tidak didukung oleh pendapatan asli daerah maka secara otomatis daerah akan bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekawarna (2017) yang menyatakan bahwa dana perimbangan memiliki kontribusi yang tinggi dalam membiayai belanja daerah pada daerah induk dan daerah pemekaran. Alokasi belanja daerah pada daerah induk dan daerah pemekaran mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber utama pembiayaan belanja daerah selain dari pendapatan asli daerah ada juga dana transfer oleh pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Dana perimbangan diberikan dengan maksud dan tujuan agar tidak terjadi kesenjangan fiskal antar daerah dan sebagai bentuk dukungan

pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Besaran dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat didasarkan pada kondisi keuangan daerah, dimana jika potensi fiskal suatu daerah kecil akan tetapi kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh dana transfer yang relatif besar. Sebaliknya jika potensi fiskal suatu daerah besar, akan tetapi kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh dana transfer yang juga relatif kecil. Disisi lain dana perimbangan diberikan dengan tujuan untuk melihat kemandirian suatu daerah, semakin banyak daerah menerima dana perimbangan maka akan dinilai bahwa tingkat kemandirian daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Apabila kondisi ini terjadi secara terus menerus maka akan terjadi fenomena *Flypaper Effect*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Menurut Alfia (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah dengan memberikan pengaruh sebesar 97,10%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zebua (2022) menyatakan bahwa secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah dengan koefisien dana perimbangan yang lebih dominan dibandingkan koefisien PAD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan merupakan komponen sumber utama pemasukan daerah yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat dan memacu pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah sebagai sumber pembelanjaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan sumber penerimaan daerah lainnya untuk membiayai belanja daerah. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan akan diteliti apakah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

Flypaper Effect

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ansori, Wakhid (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa fenomena *Flypaper Effect* terjadi dipengaruhi oleh dana perimbangan yang lebih besar daripada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisyanti, Dela Irbah Saputra (2022:646-657) yang menyatakan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* yang dikarenakan penggunaan dana alokasi umum lebih tinggi. Penerimaan Pendapatan asli daerah yang kecil dan ketergantungan akan dana transfer dari pemerintah pusat tanpa diikuti dengan kualitas belanja daerah yang memperhatikan pembangunan daerah menjadi salah satu alasan pemerintah daerah lebih bergantung pada pemerintah pusat, sehingga memiliki nilai *Flypaper Effect*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menjadi penentu apakah suatu daerah dikatakan mengalami fenomena *Flypaper Effect* ataupun tidaknya. *Flypaper Effect* terjadi apabila koefisien dana perimbangan lebih besar daripada koefisien Pendapatan Asli Daerah dalam hasil pengujian data yang diperoleh.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : *Flypaper Effect* terjadi pada Belanja Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2019:16-17), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan analisis data bersifat kuantitatif atau dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2018-2022.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka selama tahun anggaran 2018-2022.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu, data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut. Data kuantitatif dalam penelitian ini data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018-2022.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas, yakni : Dokumentasi dengan data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2022. Studi Pustaka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, dan juga jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Analisis data ini digunakan untuk menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah. Informasi yang diperoleh memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maximum, minimum, dan standar deviasi, dan juga dapat dilihat dari klarifikasi masing-masing variabel (Ghozali, 2018:19). Hasil statistic deskriptif tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	5	90816311412.52	119601046361.49	101512350658.0700	10830300717.34946
Dana Perimbangan	5	765074025024.00	1001126676974.00	886329345348.5060	96724096313.73177
Belanja Daerah	5	111225610053.75	1218737416032.00	956551224346.9421	475233380188.94090
Valid N (listwise)	5				

Sumber : Data diolah, 2023

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:145) Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah rumus *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan data berdistribusi normal jika signifikansi $> 0,05$ dan tidak berdistribusi normal jika signifikansi $< 0,05$. Hasil uji normalitas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

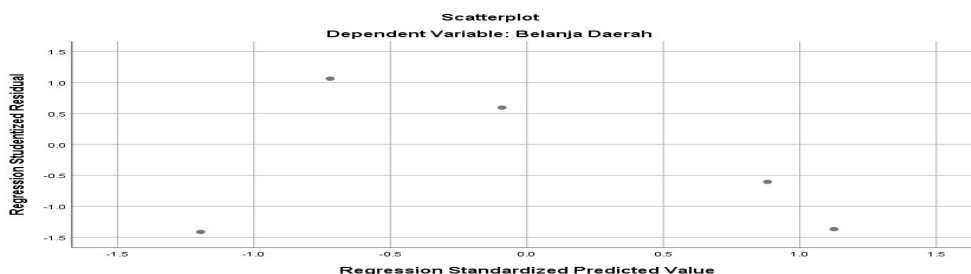
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0006836
	Std. Deviation	383660525821.24 110000
Most Extreme Differences	Absolute	.193
	Positive	.193
	Negative	-.172
Test Statistic		.193
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 ($0,200 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.



Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa titik – titik data menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a					
Model		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
		Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)		.433	.708	
	Pendapatan Asli Daerah	-.129	-.104	.927	.212 4.712
	Dana Perimbangan	-.702	-.566	.628	.212 4.712

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF sebesar 4,712 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance sebesar 0,212 lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Untuk data *time series* autokorelasi sering terjadi. Hasil uji autokorelasi tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-51374348.50610
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	3
Total Cases	5
Number of Runs	5
Z	1.200
Asymp. Sig. (2-tailed)	.230

a. Median

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $0,230 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Ghozali (2018:95) menyatakan bahwa analisis regresi linier berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen dan digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	45877061410 84.129	10607123686 366.383		.433	.708
Pendapatan Asli Daerah	-5.667	54.373	-.129	-.104	.927
Dana Perimbangan	-3.448	6.088	-.702	-.566	.628

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \xi$$

$$Y = 4,587,706,141,084.129 - 5,667 x_1 - 3.448 x_2 + \xi$$

Hasil persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (α) = **4,587,706,141,084.129**
2. Nilai Koefisien β_1 X_1 = **- 5,667**
3. Nilai Koefisien β_2 X_2 = **- 3.448**

4. Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Hasil uji t tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	45877061410 84.129	10607123686 366.383		.433	.708
Pendapatan Asli Daerah	-5.667	54.373	-.129	-.104	.927
Dana Perimbangan	-3.448	6.088	-.702	-.566	.628

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

4. Sumber : Data diolah, 2023

5. Hasil Uji F

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap variabel dependen (Belanja Daerah). Hasil uji F tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31460546628950 0800000000.000	2	15730273314475 0400000000.000	.534	.652 ^b
	Residual	58878159629372 4870000000.000	2	29439079814686 2430000000.000		
	Total	90338706258322 5600000000.000	4			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data diolah, 2023

6. Hasil Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2018:97) Koefisien determinasi ($\text{Adjusted } R^2$) untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Hasil uji koefisien determinasi tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.590 ^a	.348	-.303	542577918963.59 220	2.399

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai R Square adalah 0,348 atau 34,8%. Artinya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menjelaskan variabel Belanja Daerah sebesar 34,8%, dan sebesar 88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

7. Analisis *Flypaper Effect*

Ukuran yang digunakan untuk pengujian *flypaper effect* dilakukan dengan membandingkan efek Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dengan efek Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. *Flypaper effect* akan terjadi dengan ketentuan : (1) Apabila efek (nilai koefisien) Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek Pendapatan Asli Daerah dan keduanya sama-sama berpengaruh signifikan, atau (2) Pendapatan asli daerah tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Tabel 4.9 Analisis Flypaper Effect

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	45877061410 84.129	10607123686 366.383		.433	.708
Pendapatan Asli Daerah	-5.667	54.373	-.129	-.104	.927
Dana Perimbangan	-3.448	6.088	-.702	-.566	.628

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Data diolah, 2023

4.2 Pembahasan

Hasil Uji Hipotesis Variabel PAD Terhadap Belanja Daerah

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Nilai Sig. dari Pendapatan Asli Daerah adalah 0,927 dengan t hitung sebesar -0,104. Nilai Sig. $0,927 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dan Hipotesis Pertama ditolak. Hal ini diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap belanja daerah.

Tidak berpengaruhnya PAD terhadap Belanja Daerah disebabkan oleh salah satu faktor yang sekaligus menjadi kelemahan yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Faktor tersebut adalah jumlah realisasi PAD pada tiap daerah/kota tersebut yang begitu kecil dibandingkan dengan jumlah penerimaan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat selama kurun waktu periode 2018 sampai dengan 2022. Dimana diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PAD sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,29%.

Hasil Uji Hipotesis Variabel Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hasil analisis statistic menunjukkan bahwa Nilai Sig. dari Dana Perimbangan adalah 0,628 dengan t hitung sebesar -0,566. Nilai Sig. $0,628 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan Tidak Berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dan Hipotesis Kedua ditolak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa besar kecilnya penerimaan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini berbanding terbalik dengan realita APBD dimana sumber pembiayaan daerah lebih besar berasal dari Dana Perimbangan ketimbang dari PAD.

Hasil Uji Hipotesis Variabel PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan dalam daerah. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hasil analisis statistic menunjukkan bahwa Nilai Sig. dari uji F adalah 0,652 dengan Fhitung sebesar 0,534. Nilai Sig. $0,652 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama Tidak Berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dan Hipotesis Ketiga ditolak. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Besar kecilnya PAD dan Dana Perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan belanja daerah.

Flypaper Effect

Hasil analisis statistic menunjukkan bahwa Nilai Koefisien Pendapatan Asli Daerah adalah - 5,667, sedangkan Nilai Koefisien Dana Perimbangan adalah - 3,448. Secara matematis ketika Nilai Negatif mendekati angka 0 maka nilainya lebih besar dibandingkan jika Nilai Negatif lebih jauh dari angka 0. Dengan demikian Nilai Koefisien Dana Perimbangan - 3,448 $>$ - 5,667 Nilai Koefisien Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah Tidak Berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi *Flypaper effect* dalam pemanfaatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan sangat tinggi. Dana perimbangan yang merupakan dana yang menjadi kesetaraan antara daerah direspon oleh pemerintah daerah secara negatif dan digunakan lebih untuk kegiatan belanja yang menghabiskan anggaran tanpa adanya upaya lebih untuk meningkatkan berbagai potensi daerah yang ada, sehingga timbal balik yang positif terhadap peningkatan pendapatan yang berasal dari PAD tidak dapat terpenuhi. Keadaan inilah yang menyebabkan daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dan tingkat kemandirian keuangan daerah sangat rendah. Selain itu keterjadian *flypaper effect* ini membawa implikasi dimana salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat di banding mengelola sumber daya daerah sendiri melalui PAD (Bustamam dan Mulya, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Uji Statistik (Uji t) menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
2. Hasil Uji Statistik (Uji F) berdasarkan perhitungan Anova menunjukkan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
3. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,348 yang berarti bahwa variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) mampu untuk menjelaskan variasi naik turunnya Belanja Daerah (Y) di Pemerintah Kabupaten Sikka sebesar 34,8% sedangkan sisanya sebesar 88% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
4. Hasil Uji Statistik memperlihatkan tingkat koefisien Pendapatan Asli Daerah adalah -5,667 sedangkan nilai koefisien regresi Dana Perimbangan -3,448. Secara matematis ketika nilai negatif mendekati angka 0 maka nilainya lebih besar. Dengan demikian nilai koefisien Dana Perimbangan $-3,448 > -5,667$ nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi *flypaper effect* dalam pemanfaatan Belanja Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan Penulis adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka diharapkan lebih maksimal dalam menggali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar dapat meminimalkan ketergantungan dengan Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka agar lebih proposional dalam mengalokasikan belanja daerah, yakni dengan mengurangi belanja rutin dan meningkatkan belanja pembangunan, dan juga alokasi belanja lebih ditujukan kepada hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / Kota.

3. Untuk Peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan masalah serupa disarankan untuk menggunakan rentang waktu periode yang lebih panjang sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut, serta menggunakan variabel yang lebih lengkap dan bervariasi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor kuantitatif atas pengaruh komponen pendapatan sehingga belum dapat diketahui faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, R. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2014 – 2017)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Amir, M. S. (2021). *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ansori, W., & Muthmainah, M. (2018). Fenomena Flypaper Effect Atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Bali Dan Nusra. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 151-163.
- Aprilia Magie Andrea Sembel, Vekie A. Rumat, D. C. R. (2018). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–14. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekda/article/view/19789>)
- Ardiansyah. (2019). Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 2(2).
- Badrudin, R. (2017b). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Upp Stin Ykpn.
- Bahri, H. (2021). *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau Dan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2002 – 2018*. Universitas Sriwijaya.
- Brian, D., & Andrew Worthington. (1995). *Federal Expenditure And Fiscal Illusion. A Test Of The Flypaper Effect Hypothesis In Australia*, 25(1), 23–34.
- Darmadi, D. (2021). *Administrasi Keuangan Daerah*. Empat Dua Media.

- Ekawarna, S. U. (2017). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk Dan Pemekaran Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 167–184.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah*. *Equity*, 22(2), 197-214.
- Fiorentina, A. (2021). *Pengaruh Flypaper Effect Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)*. Universitas Siliwangi.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram Ibm Spss*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Imam Malik, L. I. (2021). Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 04(02), 192–216.
- Kido, N., Akuntansi, P. S., Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., Katolik, U., & Mandira, W. (2022). *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2020*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Maher, S. D. Dan C. S. (2005). *Categorical Municipal Expenditures With A Focus On The Flypaper Effect. Budgeting/Fall*.
- Maimunah, M. (2006). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera*. Universitas Gadjah Mada.
- Maimunah, M. (2008). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11(1), 37–51.
- Marici, S., Bastian, E., & Taqi, M. (2022). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kabupaten Lebak Dan Pandeglang Provinsi Banten Periode 2014-2019). *Jurnal Riset Akutansi Tirtayasa*, 07(01), 58–77.
- Michael C. Jensen, W. H. M. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structur. *Journal Of Financial Economic*, 3(4), 305–360.
- Mirda Samtia. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Tlypaper Effect Pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2016-2020*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Novella, A. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2016-2018*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Oktavianti, V. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Pengeluaran Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Pada Kabupaten Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020*. (Doctoral Dissertation, Uin Smh Banten).
- P. Courant, Gramlich, E., R. D. (1979). *The Stimulative Effects Of Intergovernmental Grants :*

Or Why Money Sticks Where It Hits. 5–21.
(http://www.Warreninstitute.Berkeley.Edu/Faculty/Rubinfeld/Profile/Publications/Stimulative_Effects.Pdf)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Putra, M. G. E. (2021). *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Pemerintah Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Putri, Z. M., & Kurnia, K. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(1).

Samtia, M. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2016-2020* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).

Sanga, Konstatinus Pati, Hermanto, S. B., & Handayani, N. (2018). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 2(2).

Sanga, K. P., Maryetha, W., & Jaeng, Y. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. *Journal On Education*, 05(02), 2721–2728.

Sembel, A. M. A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2021). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1-14.

Shah, A. (1994). *Reformasi Hubungan Fiskal Antar Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar Berkembang* (No.23). Bank Dunia.

Subadriyah. (2017). Flypapaer Effect Sebelum Dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Akrua. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 559–570.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.

Trisyanti, Dela Irbah Saputra, P. M. A. (2022). *Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Kib Dan Kit*. *Contemporary Studies In Economic, Finance And Banking*, 1(4), 646–657.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Windy Angraeni Zebua, - (2023) *Analisis Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2020-2022*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Zebua, W. A. (2022). *Analisis Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2020-2022*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.